

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Sistem Informasi Akuntansi

1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi adalah jaringan dari seluruh prosedur, formulir – formulir, catatan – catatan, dan alat – alat yang digunakan untuk mengolah data keuangan menjadi suatu bentuk laporan yang akan digunakan oleh pihak manajemen dalam mengendalikan kegiatan usahanya dan selanjutnya digunakan sebagai alat pengambilan keputusan manajemen.

Sistem informasi Akuntansi tersebut selain digunakan sebagai alat manajemen untuk mendapat informasi, menganalisis dan memutuskan, juga berfungsi sebagai alat untuk mempertanggung jawabkan wewenang yang telah didelegasikan manajemen kepada level – level manajemen dan karyawan dibawahnya. Pertanggung jawaban tersebut akan berjalan lancar dengan bantuan suatu sistem yang memungkinkan setiap karyawan mencatat dan mendokumentasikan seluruh kejadian dan transaksi yang terjadi dengan sistematis, teratur, baku dan mudah.

2. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Tujuan pokok diselenggarakannya sistem informasi akuntansi adalah terciptanya pengendalian intern yang melembaga menjadi suatu budaya manajemen yang sehat. Selain itu sistem informasi akuntansi juga bermaksud untuk :

- a. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan kegiatan keuangan perusahaan.
- b. Memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan secara langsung.
- c. Melakukan pengendalian kepada seluruh aspek perusahaan.¹³

B. Akuntansi Sektor Publik

1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik adalah kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan.¹⁴

Akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi.

¹³Anna Marina dkk, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Surabaya: UM Surabaya, 2017), hal. 32-33

¹⁴ Sarwenda Biduri, *Akuntansi Sektor Publik*, (Sidoarjo: UMSIDA PRESS, 2018), hal. 2

2. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik memiliki beberapa tujuan yaitu :

a. **Pertanggungjawaban**

Dalam tujuan pertanggungjawaban pemerintah harus memberikan informasi keuangan secara lengkap, memberikan informasi keuangan secara cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat.

b. **Manajerial**

Dalam tujuan manajerial, memberikan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan pengawasan anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah adalah tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan adanya akuntansi pemerintah.

c. **Pengawasan**

Pengawasan memiliki arti bahwa informasi yang dihasilkan akuntansi pemerintahan yaitu harus memungkinkan untuk terselenggarakan pemeriksaan oleh aparat pengawas.

Berdasarkan definisi diatas maka tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi, memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab

mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya.¹⁵

3. Penerapan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia

Di Indonesia, akuntansi sektor publik awal kemerdekaan 17 Agustus 1945 belum banyak berkembang. Menurut catatan sejarah penerapan akuntansi sektor publik awalnya adalah pembuatan neraca kekayaan negara yang dikeluarkan pada tahun 1948. Bentuk laporan keuangan ini masih dalam bahasa dan mata uang Belanda.

Pada era pemerintahan orde lama sekitar tahun 1950an, sektor public berperan besar dalam pembuatan dan pelaksanaan strategi pembangunan Indonesia. Dengan adanya akuntansi sektor publik yang terkait dengan manajemen ekonomi makro membantu pencatatan rencana pembangunan dan pelaksanaan pembangunan negara. Selain itu, penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia adalah BUMN. Pada tahun 1959 pemerintah orde lama memulai membuat kebijakan yaitu nasionalisasi perusahaan asing yang ditransformasi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), contohnya adalah perusahaan telekomunikasi. Selanjutnya sumbangan sektor publik dapat digunakan sebagai alat pantau pembangunan nasional dan stabilitas publik, sejak saat itulah akuntansi sektor publik di Indonesia semakin berkembang.

¹⁵ Deddi Nordiawan, “*Akuntansi Sektor Publik, Edisi Kedua*” (Jakarta:Salemba Empat, 2010) ,hal.7

Terdapat 4 prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang telah dirumuskan dalam undang-undang bidang keuangan negara yaitu :

- a. Akuntabilitas (pertanggung jawaban dari pemegang manajemen organisasi untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan organisasi kepada pihak pemilik organisasi) berdasarkan hasil taua kinerja.
- b. Keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah.
- c. Pemberdayaan manajer professional
- d. Adanya lembaga pemeriksaan eksternal yang kuat, professional, dan mandiri serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia saat ini adalah adanya pelaksanaan otonomi daerah (hak tiap daerah untuk mengatur rumah tangga sendiri) dan desentralisasi (pendelgasian wewenang). Saat ini desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah, namun juga berlaku pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada pihak swasta dengan privatisasi (pelibatan modal swasta dalam struktur modal perusahaan publik).¹⁶

¹⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hal. 15

C. Anggaran Sektor Publik

1. Pengertian Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2009:12) anggaran sektor publik adalah instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Anggaran menjadi penghubung antara sumber daya keuangan dengan perilaku manusia dalam rangka pencapaian tujuan keuangan.

2. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik

Penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran dilakukan dalam satu periode dan merupakan satu rangkaian proses yang saling berkaitan. Adapun proses penyusunan anggaran mempunyai 4 (empat) tujuan:

- a. Untuk memberikan bantuan pada organisasi sektor publik agar dapat mencapai tujuan dan meningkatkan koordinasi antara bagian dalam lingkungan.
- b. Untuk membantu menciptakan efisiensi, efektifitas dan asas keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses prioritas.
- c. Memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
- d. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemegang manajemen organisasi sektor publik.

Faktor-faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah:

- 1) Tujuan dan target yang akan diraih
- 2) Pemilik sumber daya
- 3) Waktu yang dibutuhkan untuk meraih tujuan dan target
- 4) Faktor lain yang mempengaruhi anggaran seperti peraturan baru, inflasi, fluktuasi pasar, bencana alam dan lain sebagainya.¹⁷

D. Akuntansi Desa

1. Pengertian Akuntansi Desa

Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga mampu menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan untuk pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.¹⁸

2. Tujuan Laporan Keuangan Akuntansi Desa

Tujuan laporan keuangan desa adalah untuk menyajikan informasi realisasi anggaran dan posisi keuangan pemerintah desa yang bermanfaat bagi para pengguna dalam mengevaluasi kebijakan atau keputusan lalu dan

¹⁷ *Ibid.*, hal. 28

¹⁸ Harnita Rahayu, dan Nur Handayani, “*Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa*”, (Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Vol 8, No 5, 2019), hal 5

merencanakan kebijakan di masa depan. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Desa berada pada Kepala Desa.¹⁹

E. Akuntansi Pemerintah

1. Pengertian Akuntansi Pemerintah

Akuntansi Pemerintah adalah akuntansi yang digunakan dalam suatu organisasi pemerintahan / lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba, dan merupakan suatu bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang utuh. Tujuan dari akuntansi pemerintah itu sendiri memang bukan mutlak mencari laba. Atas nama terselenggaranya kehidupan bernegara lebih baik, laba juga dapat diambil, tentu dengan mementingkan pelayanan kepada masyarakat terlebih dahulu.²⁰

2. Fungsi Akuntansi Pemerintah

Akuntansi dalam bidang apapun adalah sama yaitu menyajikan informasi bagi berbagai pihak tentang kejadian – kejadian ekonomi sebagai dasar pengambilan keputusan. Namun selain fungsi umum, akuntansi pemerintahan memiliki fungsi khusus yaitu :

¹⁹ Jamaluddin Majid, *Akuntansi Sektor Publik*, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almailda, 2019), hal 229

²⁰ *Ibid*, hal 110

- 1) Menghitung layanan yang dicapai oleh pemerintah
- 2) Membantu mengamankan dan mengawasi semua hak dan kewajiban pemerintah khususnya dari segi ukuran finansial.
- 3) Memberikan informasi yang sangat berguna kepada para pihak yang berkepentingan.
- 4) Mengukur efektifitas dan efisiensi kinerja eksekutif di dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya.²¹

F. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

1. Berikut ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Pengelolaan Keuangan Desa

- 1) Pasal 1 ayat (6) berisi tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban keuangan desa.
- 2) Pasal 2 ayat (1) berisi Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.²²

²¹ Jamaluddin Majid, *Akuntansi Sektor Publik*, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almailda, 2019), hal 117

²² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, hal 5

b. Perencanaan

- 1) Pasal 31 ayat (2) berisi tentang Sekretaris Desa menyusun rancangan APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.
- 2) Pasal 32 ayat (2) berisi tentang Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- 3) Pasal 32 ayat (3) berisi tentang Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- 4) Pasal 34 ayat (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- 5) Pasal 38 ayat (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.²³

²³ *Ibid*, hal 21

c. Pelaksanaan

- 1) Pasal 43 ayat (1) berisi tentang Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
- 2) Pasal 44 ayat (1) berisi tentang Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.
- 3) Pasal 44 ayat (2) Bupati/Wali Kota melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- 4) Pasal 45 ayat (1) berisi tentang Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
- 5) Pasal 45 ayat (6) berisi tentang Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa.
- 6) Pasal 47 ayat (1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya

perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.

- 7) Pasal 48 ayat (1) berisi tentang Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.
- 8) Pasal 54 ayat (3) berisi tentang Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.
- 9) Pasal 57 ayat (1) berisi tentang Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa.
- 10) Pasal 58 ayat (1) berisi tentang Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- 11) Pasal 60 ayat (4) berisi tentang Kaur dan atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan

dan anggaran kepada kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.

- 12) Pasal 62 ayat (1) berisi tentang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan.²⁴

d. Penatausahaan

- 1) Pasal 63 ayat (1) berisi tentang Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.²⁵
- 2) Pasal 64 ayat (1) berisi tentang Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas :
 - a) Buku Pembantu Bank
 - b) Buku Pembantu Pajak
 - c) Buku Pembantu Panjar

e. Pelaporan

- 1) Pasal 68 ayat (1) berisi tentang Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat.²⁶

²⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, hal 27

²⁵ *Ibid*, hal 36

²⁶ *Ibid*, hal 38

f. Pertanggungjawaban

- 1) Pasal 70 ayat (1) berisi tentang Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.²⁷

2. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Pamendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 2 bagian kedua tentang asas pengelolaan keuangan desa bahwasanya keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dimana APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan dalam masa 1 tahun anggaran mulai tanggal 1 januari sampai dengan 1 desember.²⁸

3. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah suatu bentuk tahap atau proses dalam mengelola keuangan desa yang terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa.

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap perumusan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada desa yang bersangkutan. Pemerintah desa melakukan perencanaan dalam rangka pembangunan desa yang sesuai dengan kewenangannya.

²⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, hal 39

²⁸ *Ibid*, hal 6

b. Pelaksanaan.

Pelaksanaan keuangan desa merupakan kegiatan dari proses perencanaan yang sudah ada dan kemudian pertahap-pertahap dilaksanakan dalam proses pembangunan desa. Untuk mencapai target pelaksanaan harus dilaksanakan dengan baik.

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa merupakan suatu kegiatan pada tahap ini proses penatausahaan dalam proses pembangunan desa dan laporan harus di lakukan dengan baik. Dalam tahap ini seluruh kegiatan yang telak dilaksanakan di kelompokan dan disusun dengan baik untuk di laporkan.

d. Pelaporan

Pelaporan keuangan desa yang dimaksud adalah tahap terakhir dari bentuk pengelolaan keuangan desa. Setelah semua proses telah selesai akan disusun dalam bentuk laporan keuangan dan kemudian akan di laporkan kepada pihak yang bersangkutan.²⁹

²⁹ Jehan M. Malahika, dkk, “Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) Pada organisasi Pemerintah Desa”, (Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol. 13, No.4, 2018), hal 2

G. Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.³⁰

2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut Dwi Martani, laporan keuangan memiliki beberapa karakteristik utama yaitu adalah relevan, andal dan dapat dipahami. Karakteristik tersebut harus dipenuhi agar laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna untuk pengambilan keputusan.³¹

Karakteristik kualitatif analisis laporan keuangan harus bisa dipahami mengacu kepada pemakai laporan keuangan yang umum, tidak secara khusus atau kelompok orang tertentu. Dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang kita ketahui dari kualitas secara keseluruhan. Relevan yang dapat diartikan laporan keuangan bisa membantu dalam membentuk harapan

³⁰ Hery, " *Analisis Laporan Keuangan, Cet. 2*", (Jakarta : Grasindo, 2017), hal. 3

³¹ Dwi Martani., dkk, " *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK, Cet. 1*", (Jakarta : Salemba Empat, 2014), hal. 54

atau kesimpulan tentang hasil masa lalu, sekarang dan yang akan datang atau mampu memberikan feedback dan tepat waktu.

Dapat memprediksi secara lebih akurat, dan kemampuan umpan balik. Artinya laporan dimasa lalu dapat berguna untuk memprediksi masa mendatang lebih tepat lagi. Selain itu informasi juga harus reabilitas, bisa diverifikasi dan mempunyai keterkaitan antara pengukuran dan apa yang diukur atau valid. Karakteristik kualitatif yang selanjutnya yaitu informasi akuntansi bisa diperbandingkan atau mempunyai sifat konsistensi.

3. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan mempunyai tujuan yang bersifat umum dan kemudian bergerak ke bagian yang lebih spesifik. Berikut ini adalah beberapa tujuan dari laporan keuangan.³²

a. Pertama

Laporan keuangan dalam pengambilan keputusan berisikan informasi yang bermanfaat. Manfaat disini diartikan bisa memberikan tujuan umum bagi investor, kreditur, dan pemakai laporan keuangan. Untuk saat ini, atau yang akan datang dalam mengambil keputusan-keputusan yang rasional.

³² Mahduh M. Hanafi dan Abdul Halim, “*Analisis laporan Keuangan*”, (Yogyakarta: YKPN, 2016), hal. 33-34

b. Kedua

Dapat memperkirakan aliran kas untuk pihak eksternal. Artinya laporan keuangan harus bisa memberikan informasi yang berguna untuk pemakai eksternal dalam memperkirakan jumlah, waktu, ketidakpastian atau risiko dan aliran kas. Hal ini membantu dalam menganalisis dan memperkirakan resiko yang berkaitan.

c. Ketiga

Laporan keuangan yang berisi informasi untuk memperkirakan kas perusahaan. Penerimaan kas akan berlangsung selama siklus bisnis entitas tersebut, dimulai sejak pembelian bahan-bahan mentah, sampai penerimaan kas kembali.

d. Keempat

Tujuan spesifik mengetahui sumber daya ekonomi dan klaim terhadap sumber daya tersebut. Mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dan memperkirakan potensi perusahaan. Kelima, bahwa laporan keuangan memberikan informasi tentang pendapatan dan lainnya selama periode tertentu. Yang berguna dalam mengevaluasi prestasi manajemen perusahaan. Dan yang terakhir mengenai aliran kas perusahaan. Bagaimana perusahaan mampu dalam pelunasan pinjaman, transaksi permodalan dan lainnya.

H. Aplikasi Sistem Keuangan Desa

1. Pengertian Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Aplikasi Sistem Keuangan Desa merupakan aplikasi yang di buat oleh BPKP untuk membantu pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa. Aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan oleh pemerintah desa karena fitur yang tersedia sangatlah mudah untuk dipahami dan dimengerti. Dengan tampilan yang sederhana membuat aplikasi ini terlihat sangat sederhana namun sangat baik untuk digunakan. Bisa menggunakan jaringan internet dan juga tidak. Aplikasi ini dibuat sudah menyesuaikan dengan proses dan tahap laporan keuangan dan dokumen-dokumen yang ada hanya akan di input saja karena sudah tertata dengan baik.³³

2. Tujuan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Berikut ini adalah tujuan dari aplikasi sistem keuangan desa :

- a. Memastikan bahwa seluruh ketentuan dan kebijakan dalam implementasi UU desa terutama dalam bidang keuangan dapat benar-benar dijalankan dengan baik oleh seluruh pemerintahan desa.
- b. Pemerintah desa juga dapat melaksanakan tanggungjawabnya dalam pelaporan keuangan secara akuntabel dan transparan mulai

³³Jehan M Malaika dkk, “Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) Pada organisasi PemerintahDesa”, (Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol. 13, No.4, 2018), hal 2

dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan.

3. Manfaat Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Aplikasi Sistem Keuangan Desa merupakan alat bantu yang diperuntukan untuk pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dalam beberapa tahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan penatanusahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban secara komputerisasi. Terdapat beberapa keunggulan dan kelebihan dari aplikasi ini antara lain adalah:

- a. Sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan desa yang berlaku
- b. Aplikasi ini memudahkan tata kelola keuangan desa dan dana desa
- c. User friendly sehingga memudahkan dalam penggunaan aplikasi untuk level pemerintah desa
- d. Didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi
- e. Dibangun dan dikembangkan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa
- f. Kesenambungan maintenance karena merupakan aplikasi resmi pemerintah
- g. Aplikasi ini dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang terkait pengelolaan keuangan desa lainnya, seperti aplikasi OM-SPAN

milik kementerian keuangan dan SIPEDE milik kementerian desa pembangunan daerah.³⁴

4. Fitur – Fitur Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa. Proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan – laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain :

- a. Dokumen Penatausahaan
- b. Bukti Penerimaan
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- d. Surat Setoran Pajak (SSP)
- e. Dan dokumen-dokumen lainnya
- f. Laporan-laporan
- g. Laporan Penganggaran
- h. Laporan Penatausahaan
- i. Pajak, Buku Pembantu, dan Register

³⁴ <http://risehtunong.blogspot.com/2018/12/keunggulan-dan-kelebihan-aplikasi.html?m=1>
diakses pada kamis tanggal 25 Maret 2020 pukul 2021

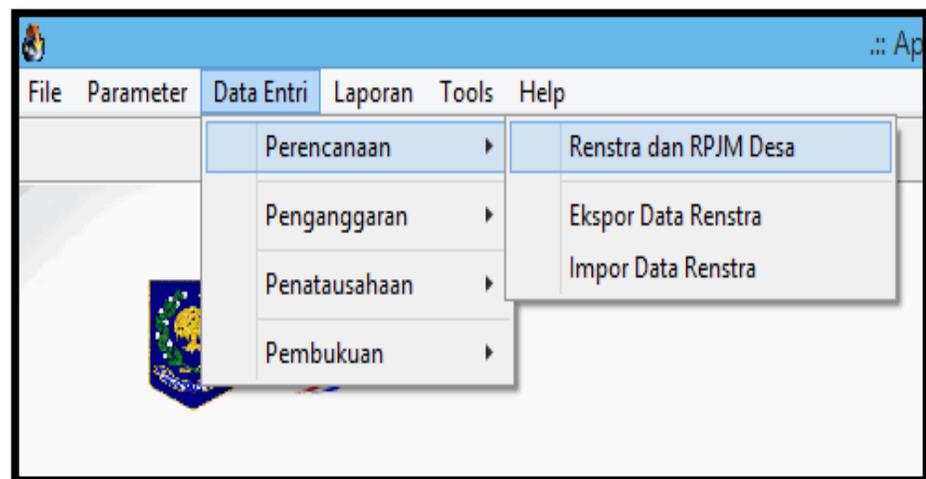
Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas mengingat dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, pemerintah desa dituntut membuat beberapa laporan.³⁵

5. Gambaran Umum Aplikasi Sistem Keuangan Desa

a. Bagian Perencanaan Desa

Berikut ini adalah gambaran umum pada aplikasi sistem keuangan desa bagian menu perencanaan sebagai berikut.³⁶

Gambar 2.1
Menu Perencanaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa



Sumber : Buku Pedoman Aplikasi Sistem Keuangan Desa 2018

³⁵<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/12/aplikasi-siskeudes-kawal-dana-desa> diakses tanggal 24 Februari 2021.

³⁶ KEMENDAGRI dan BPKP, *SISKUEDES Sistem Keuangan Desa (APLIKASI SISKUEDES 2.0)*, 2018, hal 23

Tahap pengelolaan keuangan desa yang pertama yaitu tahap perencanaan. Pengisian data perencanaan pada aplikasi sistem keuangan desa selalu dilakukan pada awal tahun anggaran dan hanya berlaku untuk satu tahun anggaran. Menu Perencanaan digunakan untuk melakukan proses entri Data Umum Desa dan penyusunan perencanaan jangka menengah (RPJMDes) dan perencanaan tahunan (RKPDDes). **Berikut ini adalah data – data yang akan di input pada aplikasi sistem keuangan desa pada bagian perencanaan sebagai berikut :**

1) Data umum Desa

Menu Data Umum dan RPJMDesa digunakan untuk melakukan penginputan data umum pemerintah Desa seperti nama kepala desa, nama sekretaris desa, tanggal perdes, dan tanggal PAK.

2) Visi dan Misi Desa

Menu Visi dan Misi Desa digunakan untuk melakukan penginputan data perencanaan pemerintah Desa seperti Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Desa.³⁷

³⁷ *Ibid*, hal 25

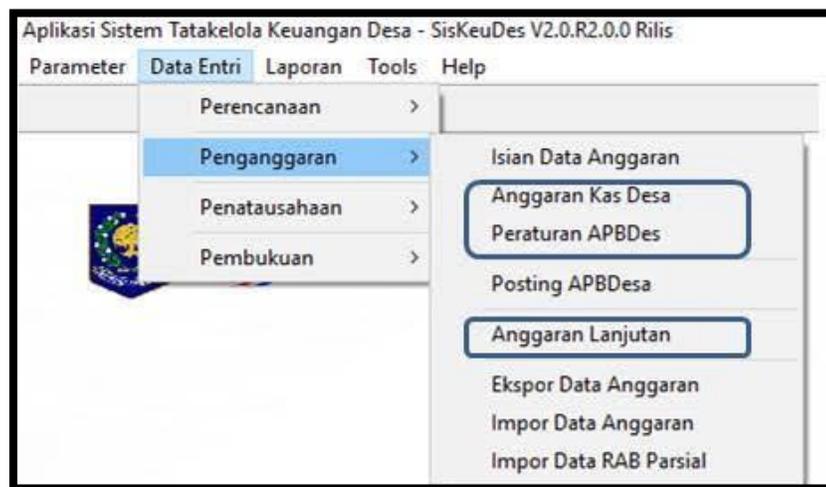
3) RPJMDesa

Menu RPJM Desa digunakan untuk melakukan penginputan data perencanaan Pemerintah Desa seperti Bidang, Sub Bidang, Kegiatan, dan Rincian Dana Indikatif.

b. Bagian Penganggaran Desa

Berikut ini adalah gambaran umum pada aplikasi sistem keuangan desa bagian menu penganggaran sebagai berikut.³⁸

Gambar 2.2
Menu Penganggaran Aplikasi Sistem Keuangan Desa



Sumber : Buku Pedoman Aplikasi Sistem Keuangan Desa 2018

³⁸ KEMENDAGRI dan BPKP, *SISKUEDES Sistem Keuangan Desa (APLIKASI SISKUEDES 2.0)*, 2018, hal 34

Menu Penganggaran digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penginputan data agar dilakukan secara berurut sesuai menu yang tersedia dalam Aplikasi Siskeudes. **Berikut ini adalah data – data yang akan di input pada aplikasi sistem keuangan desa bagian penganggaran sebagai berikut :**

1) Pada Submenu Isian Data Anggaran terdapat data – data yang harus dilengkapi yaitu sebagai berikut :

a) Menu Kegiatan

Menu Kegiatan dilakukan untuk memilih dan melakukan penginputan data Bidang, Sub Bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang bersangkutan pada tahun anggaran berjalan. Pada menu ini juga dilengkapi dengan atribut kode kegiatan kegiatan, lokasi, waktu, nama PPKD, keluaran, dan pagu anggaran kegiatan.

b) Menu Pendapatan

Menu Pendapatan digunakan untuk melakukan penginputan data anggaran Pendapatan pemerintah Desa. Pendapatan tersebut dapat berupa Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa, Hasil Pengelolaan Pasar Desa, Hasil

Usaha Desa Lainnya, Hasil Swadaya, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

c) Menu Belanja

Menu Belanja digunakan untuk melakukan penginputan data anggaran belanja pemerintah desa. Penginputan data Belanja dilakukan sesuai dengan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang akan dilaksanakan.

d) Menu Pembiayaan 1

Menu pembiayaan 1 digunakan untuk melakukan penginputan data penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan desa antara lain dapat berupa Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan dan Pencairan Dana Cadangan.

e) Menu pembiayaan 2

Menu Pembiayaan 2 digunakan untuk melakukan penginputan data Pengeluaran Pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan antara lain dapat berupa Penyertaan Modal Desa pada BUMDes.³⁹

³⁹ *Ibid*, hal 45

f) Menu Anggaran Kas Desa

Menu Anggaran Kas Desa digunakan untuk melakukan penginputan data Rencana Anggaran Kas Desa.

2) Pada Submenu Peraturan APBDes terdapat data – data yang harus dilengkapi yaitu sebagai berikut :

a) Peraturan Desa – APBDes

Peraturan Desa – APBDes adalah menu yang digunakan untuk menginput data-data yang diperlukan untuk penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes sehingga aplikasi dapat menghasilkan secara langsung Peraturan Desa- APBDes secara otomatis dalam bentuk Microsoft Word yang selanjutnya dapat diedit atau disesuaikan oleh Pemerintah Desa.

b) Peraturan Kepala Desa - Penjabaran APBDes

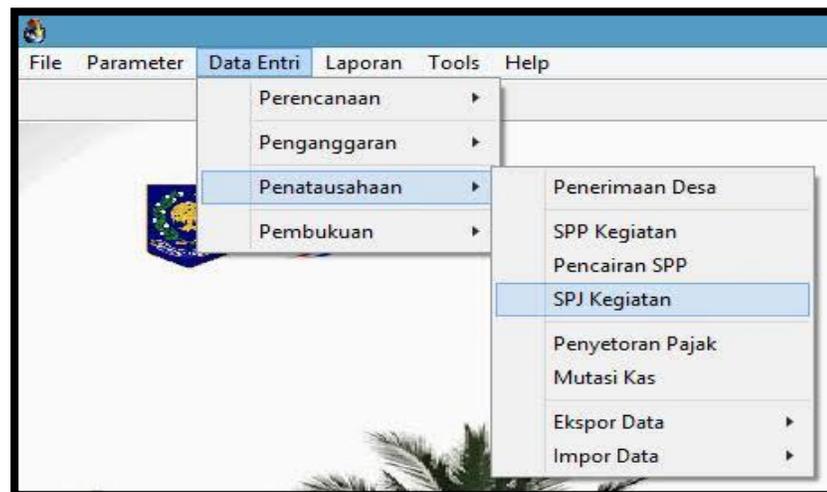
Peraturan Kepala Desa – Penjabaran APBDes adalah menu yang digunakan untuk menginput data-data yang diperlukan untuk penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes sehingga aplikasi dapat menghasilkan secara langsung Peraturan Kepala Desa- Penjabaran APBDes secara otomatis dalam bentuk

Microsoft Word yang selanjutnya dapat di edit oleh pemerintah desa.

c. Bagian Penatausahaan Desa

Berikut ini adalah gambaran umum pada aplikasi sistem keuangan desa bagian menu penatausahaan sebagai berikut.⁴⁰

Gambar 2.3
Menu Penatausahaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa



Sumber : Buku Pedoman Aplikasi Sistem Keuangan Desa 2018

Menu Penatausahaan digunakan untuk mencatat transaksi Penerimaan Desa, Pengeluaran Desa, Pencairan SPP, SPJ Kegiatan, Pengembalian Belanja, Penyetoran Pajak, Menu Mutasi Kas.

⁴⁰ KEMENDAGRI dan BPKP, *SISKUEDES Sistem Keuangan Desa (APLIKASI SISKUEDES 2.0)*, 2018, hal 66

Penginputan data agar dilakukan secara berurut sesuai menu yang tersedia dalam Aplikasi Siskeudes. **Berikut ini adalah data – data yang akan di input pada aplikasi sistem keuangan desa pada bagian penatausahaan sebagai berikut :**

1) Menu Penerimaan Desa

Penerimaan desa dikelompokkan dalam 3 macam yaitu penerimaan yang diterima secara tunai, penerimaan desa yang diterima melalui bank, penyetoran.

a) Penerimaan Tunai

Penerimaan Tunai yaitu Kaur Keuangan menerima pendapatan desa secara tunai dari masyarakat atas Pendapatan Asli Desa.

b) Penyetoran

Penyetoran yaitu uang penerimaan desa yang diterima secara tunai oleh Kaur Keuangan harus disetorkan terlebih dahulu ke Rekening Kas Desa dan tidak boleh langsung digunakan.

c) Penerimaan Bank

Penerimaan Bank yaitu Penerimaan pendapatan desa yang ditransfer langsung ke Rekening Kas Desa seperti Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diinput ke

menu Penerimaan Bank Selain itu, Pelaksana Kegiatan dapat menerima pendapatan Swadaya berupa uang yang harus disetorkan kepada Kaur Keuangan.

2) Menu Pengeluaran Desa

Penatausahaan pengeluaran itu digunakan untuk menatausahakan pengeluaran belanja di desa. Pengeluaran dimulai dengan adanya usulan SPP dari Pejabat Pelaksana Keuangan Desa (PPKD). Dalam aplikasi ini SPP dikelompokkan menjadi 3 yakni :

a) SPP Panjar

SPP Panjar yaitu uang yang diberikan kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

b) SPP Definitif

SPP Definitif yaitu digunakan untuk meminta pembayaran atas pelaksanaan kegiatan atau pengadaan barang dan jasa yang sudah diterima.

c) SPP Pembiayaan

SPP Pembiayaan yaitu SPP Pembiayaan digunakan untuk melakukan pengajuan pencairan untuk

pengeluaran pembiayaan, antara lain seperti penyertaan modal pada BUMDes.

3) Menu Pencairan SPP

Menu Pencairan SPP digunakan untuk mencairkan uang dari Kaur Keuangan berdasarkan SPP yang telah disetujui oleh Kepala Desa.

4) Menu SPJ Kegiatan

Menu SPJ Kegiatan adalah menu yang digunakan untuk pertanggungjawaban SPP Panjar yang pernah diajukan sebelumnya.

5) Menu Pengembalian Belanja

Aplikasi Siskeudes menyediakan menu untuk pengembalian belanja. Dengan pengembalian belanja ini maka uang di Kaur Keuangan akan bertambah, sedangkan nilai belanja yang bersangkutan akan dikurangi sebesar nilai yang dikembalikan di tahun berjalan.

6) Menu Penyetoran Pajak

Menu penatausahaan pajak digunakan untuk melakukan penyetoran pajak yang telah dipungut melalui bukti kuitansi pembayaran.

7) Menu Mutasi Kas

Menu mutasi kas digunakan untuk mencatat mutasi pergeseran saldo kas desa dan untuk mencatat pembebanan biaya administrasi

8) Menu Biaya Admin Bank

Menu Biaya Admin Bank digunakan untuk mencatat pembebanan biaya administrasi bank pada Rekening Desa.⁴¹

⁴¹ *Ibid*, hal 113

I. Penelitian Terdahulu

Untuk memperjelas dan menegaskan pada penelitian ini ada penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan terkait tentang Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Kinerja Pemerintah Desa Jabon antara lain :

Jehan M Malaika dkk,⁴² Di Dalam penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti mempunyai maksud yaitu untuk mengetahui Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) Pada organisasi Pemerintah Desa, Di dalam penelitian yang dilakukan oleh seorang tersebut seorang peneliti tersebut menggunakan metode menggunakan penelitian deskriptif dengan menggumpulkan data hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari kantor Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara mengenai permasalahan penelitian. Serta kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa hasil penelitian yang telah di lakukan bahwa Penerapan Sistem Keuangan Desa di Desa Suwaan sudah berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di dapatkan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Prosedur penggunaan Sistem Keuangan Desa di Desa Suwaan dilakukan sesuai prosedur Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan, Kesiapan Pemerintah Desa dalam melaksanakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa sudah dapat dikatakan siap karena dari segi SDM yang sudah

⁴² Jehan M Malaika dkk, “Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) Pada organisasi Pemerintah Desa”, (Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol. 13, No.4, 2018), hal 1-4

terpenuhi, Manfaat dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa menjadikan Pemerintah Desa bekerja lebih efektif dan efisien dalam menghasilkan Laporan Keuangan, Kendala terhadap penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa yaitu sering terjadi masalah *error* saat proses peng inputan, Masih terdapat beberapa laporan yang belum terinput ke sistem dan masih menggunakan pelaporan secara manual. Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama mendiskripsikan tentang penerapan aplikasi sistem keuangan desa.

Zainal Fanani,⁴³ Di Dalam penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui strategi yang digunakan dalam penggunaan aplikasi sistem keuangan desa yang dilakukan pada pemerintah daerah di Kabupaten Nganjuk. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh seorang tersebut seorang peneliti tersebut menggunakan metode kualitatif. Untuk bahan yang didapatkan dalam membentuk suatu laporan tersebut yaitu di dapat dari proses wawancara dan pengamatan sebagai bahan untuk membuat laporan tersebut. Serta kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa menurut pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam melakukan proses pengelolaan keuangan lebih efektif menggunakan aplikasi sistem keuangan desa. Tetapi disamping itu pemerintah daerah kabupaten nganjuk dalam menggunakan aplikasi tersebut sedikit mengalami kendala yaitu telatnya destruksi dana, kurangnya kesadaran terhadap periode yang sudah ditentukan. Serta pertanggung jawaban dan

⁴³ Zainal Fanani, “Strategi Implementai Aplikasi Ssistem Keuangan Desa”, (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 2, No. 4, 2018), hal 1

keterbukaan pemerintah daerah kabupaten nganjuk dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa yang masih rendah. Persamaan pada penelitian ini yaitu objek pada penelitian sama. Perbedaan pada penelitian ini adalah tujuan pada penelitian tersebut.

Gusti Ayu Trisnha Sulisna dkk,⁴⁴ penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi aplikasi sistem keuangan desa terhadap kemampuan pegawai dalam menggunakan aplikasi tersebut yang terdapat pada pemerintah desa kaba – kaba. Seorang peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode yang sifatnya kualitatif. Serta seorang ini peneliti mendapat evidensi sebagai bahan untuk membuat laporan yaitu dengan menggunakan riet dan interview. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti adalah dalam proses penginputan data harus sesuai dengan sistem dan penggunaan aplikasi tersebut terbukti meningkatkan semangat kerja para pegawai. Persamaan pada penelitian ini adalah objek yang diteliti sama. Perbedaan pada penelitian ini yaitu tujuan pada penelitian tersebut.

Gayatri,⁴⁵ pada penelitian yang oleh seorang peneliti bertujuan untuk memahami efisiensi dari penggunaan aplikasi sistem keuangan desa terhadap kapasitas laporan keuangan dana desa. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti, seorang peneliti menggunakan metode yang sifatnya deskriptif.

⁴⁴ Gusti Ayu Trisnha Sulisnha dkk, “Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa”, (Jurnal S1 Akuntansi Vol. 8, No. 2, 2017), hal 1

⁴⁵ Gayatri, “Efektivitas Penerapan SISKUEDES dan Kualitas Laporan Keuangan Desa”, (Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Vol. 13, No. 2, 2018), hal 1

Hasil penelitian ini adalah dengan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa tersebut merupakan cara yang efektif dalam melakukan pengelolaan dana desa. Persamaan pada penelitian ini adalah objek yang diteliti sama. Perbedaan pada penelitian ini adalah tujuan dari penelitian ini berbeda.

Wahid Assyahri dan Mercya Vaguita,⁴⁶ di dalam penelitian yang berlangsung yaitu mempunyai maksud untuk memahami Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Nagari Kayu Tanam Kecamatan Kayu Tanam. Seorang peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan metode yang sifatnya kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini dalam penggunaan aplikasi sistem keuangan desa sudah dijalankan dengan cukup baik. Dimulai dari tahap pelaksanaan sampai dengan pertanggung jawaban. Tetapi di samping itu dalam penggunaan aplikasi tersebut masih beberapa kendala. Pegawai pada pemerintahan desa tersebut tidak bisa melakukan kegiatan operasionalnya secara maksimal. Persamaan pada penelitian ini adalah objek yang diteliti sama. Perbedaan pada penelitian ini adalah tujuan dari penelitian ini berbeda.

Fani Riani dkk,⁴⁷ penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti bermaksud untuk memahami penggunaan aplikasi sistem keuangan desa yang terdapat pada pemerintahan desa karya bakti. Metode yang digunakan oleh seorang peneliti ini

⁴⁶ Wahid Assyahri dan Mercya Vaguita, "*Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) di Nagari Kayu Tanam Kecamatan Kayu Tanam*", (Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 18, No. 2, 2018), hal 1

⁴⁷ Fani Riani dkk, "*Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) Pada Pemerintah Desa Karya Bakti Kecamatan Muara Wahu Kabupaten Kutai Timur*", (Jurnal Pemerintahan Integratif Vol. 7, No. 4, 2019), hal 1

adalah deskriptif dengan ulasan kualitatif.. kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan sistem keuangan desa pada pemerintah Desa Karya Bakti masih kurang baik. Karena pegawai dalam pemerintahan desa tersebut masih belum memahami cara pegoperasian aplikasi tersebut. hasilnya para pegawai kesulitan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Dan cara untuk mengintergerasikan sumber daya manusia pada pemerintahan desa tersebut masih rendah. Dan solusi untuk mengatasi problema tersebut. Seharusnya pegawai melakukan koordinasi dengan pendamping desa agar diberikan pelatihan dan pengarahan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Sehingga pegawai ada pemerintah tersebut dapat menggunakan aplikasi tersebut dengan optimal. Persamaan pada penelitian ini adalah objek yang diteliti sama. Perbedaan pada penelitian ini adalah tujuan dari penelitian ini berbeda.

Nuke Yuandika dkk,⁴⁸ Penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti bertujuan untuk mengetahui penerapan aplikasi sistem keuangan desa (siskuedes) dalam meningkatkan penatausahaan Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Di dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut seorang peneliti tersebut menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Serta kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan

⁴⁸ Nuke Yuandika dkk, “*Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) Dalam Meningkatkan Penatausahaan Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk*”, (Jurnal Mutiara Akuntansi Vol. 5, No. 1, 2020), hal 1

Kabupaten Nganjuk sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Namun dalam praktiknya, Desa Sukoharjo masih belum sepenuhnya mengikuti tahapan-tahapan yang sudah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini dikarenakan terkadang ada ketidaksesuaian dana untuk belanja dengan besarnya proyek. Sistem “nalangi” yang diatur dalam 113 Tahun 2014 pada tahap pelaksanaan sedikit menyusahkan Pemerintah Desa, Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan Penatausahaan di Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk meliputi tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Akuntabilitas pada dan pertanggung jawaban meningkat dengan adanya aplikasi Siskeudes ini karena laporan yang dibuat sudah sesuai dengan standar dan regulasi Pemerintah. Aplikasi Sistem Keuangan Desa juga mewujudkan adanya efektifitas dan Efisiensi pengelolaan keuangan di Desa Sukoharjo. Beban pekerjaan Bendahara Desa dan diringinkan dengan adanya pembuatan laporan pembukuan penatausahaan terkomputerisasi melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa. Persamaan pada penelitian ini adalah objek yang diteliti sama. Perbedaan pada penelitian ini adalah tujuan dari penelitian ini berbeda.

Oktaviani Rita Purpasari dan Dendi Purnama,⁴⁹ Penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Implementasi Sistem Keuangan Desa terhadap kualitas laporan Keuangan Pemerintah Des, dimana terdapat variabel kompetensi SDM, kualitas data, dukungan manajemen puncak, kualitas sistem dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel pemoderasi. Serta jenis metode yang digunakan oleh seorang peneliti tersebut adalah metode Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori (*explanatory research*). Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Analisis terhadap sistem keuangan desa (siskeudes) dan kualitas laporan keuangan dilakukan pada objek pemerintah desa di wilayah Kabupaten Kuningan. Variabel dalam penelitian ini adalah kompetensi SDM, kualitas sistem, kualitas data, dan implementasi sistem keuangan desa, yang digunakan untuk menguji pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Sedangkan, variabel pemoderasi dalam penelitian ini adalah kualitas sistem dan pemanfaatan teknologi. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 dan responden dalam penelitian ini adalah kaur keuangan dan bendahara desa yang mengelola sistem keuangan desa di wilayah kabupaten Kuningan. Jumlah responden yaitu 190 responden. Persamaan pada penelitian ini adalah objek yang diteliti sama. Perbedaan pada penelitian ini adalah tujuan dari penelitian ini berbeda.

⁴⁹ Oktaviani Rita Purpasari dan Dendi Purnama, “Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Kuningan”, (Jurnal Kajian Akuntansi Vol. 2, No.2, 2018), hal 1

Mufti Arief Arfiansyah,⁵⁰ Penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Serta metode yang digunakan oleh seorang peneliti dalam penelitian tersebut adalah metode Desain penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif. Serta hasil dari penelitian tersebut adalah Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Beberapa saran yang dapat ditindaklanjuti pada penelitian lanjutan. Variabel sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern pemerintah hanya menjelaskan 49,9 % terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka pada penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengembangkan hasil penelitian ini dengan menambahkan variabel lain dan menggunakan alat analisis yang berbeda. Pemilihan responden harus diperhatikan yaitu pihak yang benar-benar mewakili pemerintah desa yaitu kepala desa sebagai pemegang kuasa atas dana desa di pemerintahan desa atau perangkat desa sebagai operator pelaksana dana desa. Persamaan pada penelitian ini adalah objek yang diteliti sama. Perbedaan pada penelitian ini adalah tujuan dari penelitian ini berbeda.

⁵⁰ Mufti Arief Arfiansyah, “*Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*”, (Journal Islamic Finance and Accounting Vol. 3, No.1, 2020), hal 1

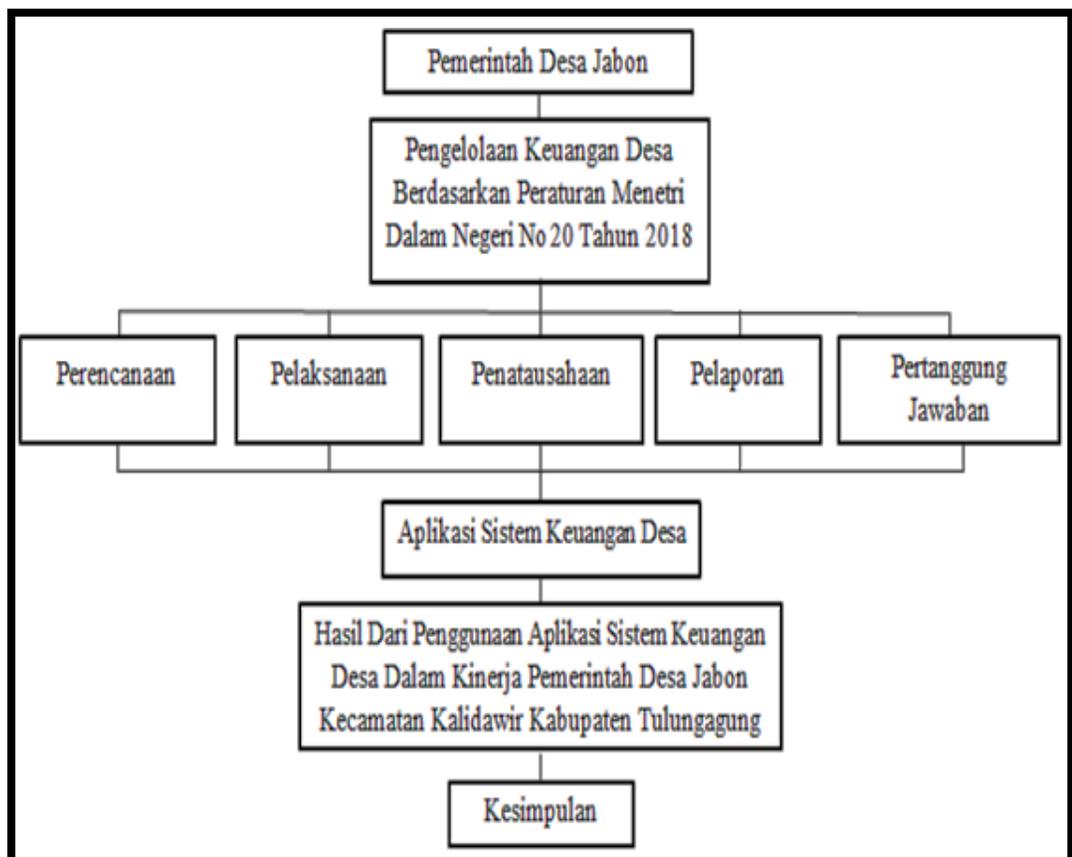
Muhammad Sapril Sardi Juardi dan Mustakim Muchlis,⁵¹ Penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa. Serta metode yang digunakan oleh seorang peneliti dalam penelitian tersebut adalah metode Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dengan keadaan subjek atau objek dalam penelitian berupa orang. Serta kesimpulan dari penelitian tersebut adalah penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Jenetallsa sudah diterapkan pada tahun 2015 dan dalam berproses penerapannya dalam hal ini aparat desa diberi bimbingan dan pelatihan khusus. Agar dalam proses pelaksanaan dan pengelolaan aplikasi dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berikut dapat digambarkan berdasarkan hasil wawancara di lapangan mengenai sistem pengelolaan keuangan desa. Persamaan pada penelitian ini adalah objek yang diteliti sama. Perbedaan pada penelitian ini adalah tujuan dari penelitian ini berbeda.

⁵¹ Muhammad Sapril Sardi Juardi, dan Mustakim Muchlis, “*Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*”, (Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Vol. IV, No. 1, 2018), hal 1

J. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa yaitu dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban. Penggunaan aplikasi sistem keuangan desa tersebut mengacu peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 yaitu tentang pengelolaan desa dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban. kemudian laporan hasil pengelolaan tersebut disajikan kepada pihak kepentingan dan masyarakat desa.

Gambar 2.4
Kerangka Berfikir



Sumber : Data Diolah oleh Peneliti